



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 – 2029

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT karena berkah dan hidayahNya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah. 2025 – 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, menitikberatkan dalam pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan serta peningkatan budaya baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah-kaidah sistem kearsipan di Propinsi Sulawesi Tengah

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran serta data dalam penyempurnaan Renstra ini dan kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia.

Palu, 01 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Muh. Idham Khalid, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19731231 199403 1 010003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	39
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	49
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	53
3.3. Metadata Indikator tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah	56
3.4. Penahapan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	61
3.5. Locus Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan wilayah pengembangan kabupaten/Kota sesuai kebutuhan pengembangan daerah	63

3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	64
---	----

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	66
4.2. Uraian Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	104
4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program	105
4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	105

BAB V. PENUTUP 107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.4	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	23
Tabel 2.5	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.6	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.7	Jumlah Jenis Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.8	Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin ...	24
Tabel 2.9	Data Pengunjung Berdasarkan Segmen Masyarakat Pengguna Periode Tahun 2021 s/d 2025	32
Tabel 2.10	Data Arsip Hasil Akuisisi	35
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Provisi Sulawesi Tengah	52
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawei Tengah	61
Tabel 3.3	Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	65
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Tengah	68
Tabel 4.3	Rencana Program/ Kegiatan/ SubKegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	74

Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra	104
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama rancangan Akhir Renstra	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Resntra Pemerintah Daerah	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	28
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	53
Gambar 3.2	Konsep Renstra Perangkat Daerah	54
Gambar 3.3	Cascading Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029	56
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan adalah institusi penyelenggara kepastakaan, koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai oleh bangsa indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditegaskan bahwa eksistensi perpustakaan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Arsip adalah naskah atau catatan yang tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah. Arsip adalah merupakan dokumen negara yang otentik dan kredibel sebagai bukti utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun beberapa dokumen perencanaan antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan pada setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra-PD tahun 2025–2029 ini dilaksanakan berdasarkan amanat **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029*.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 dilandasi oleh berbagai perubahan lingkungan strategis serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tata kelola perpustakaan dan kearsipan yang profesional, modern, dan inklusif. Periode perencanaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi sektor perpustakaan dan kearsipan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, literasi masyarakat dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan strategis jangka menengah yang terstruktur, terukur, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mewujudkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Perumusan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penyesuaian dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat di dalam rencana strategis ini sejalan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029.

Sebagai rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : ***“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”***.

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perencanaan strategis yang memuat program-program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan yang bersifat mendasar dan mendesak untuk memecahkan permasalahan sosial yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang memerlukan suatu strategis bersama dan langkah-langkah menyeluruh disegala bidang pembangunan perpustakaan dan kearsipan harus mengaktualisasikan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat sebagai penggagas, perencana, pelaksana sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan, serta acuan dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 01 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Layanan Satu Metadata Koleksi Perpustakaan Nasional;
30. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
31. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 161);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib perpustakaan dan kearsipan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah,

- b. Sebagai kerangka acuan bagi seluruh pejabat baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi maupun Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah,
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas di bidang perpustakaan dan kearsipan,
- d. Sebagai landasan operasional dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2025 – 2029,
- e. Sebagai bahan acuan dalam mengukur capaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
- f. Untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang profesional, akuntabel dan bertanggung jawab dalam penyusunan tahapan perencanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan komitmen dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai

- sasaran pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu periode 2025 – 2029,
- b. Untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan melalui penyusunan program dan kegiatan bagi seluruh aparatur yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029,
 - c. Menjamin adanya konsistensi perencanaan antara program dan kegiatan yang bersifat prioritas sesuai dengan kebutuhan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan,
 - d. Untuk mempermudah bagi seluruh pejabat struktural, fungsional maupun pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memahami untuk menentukan program dan kegiatan prioritas bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan strategi dan arah kebijakan,
 - e. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya sehingga dapat lebih terarah, terukur dan dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan nilai strategis perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dari tingkat undang-undang hingga peraturan kepala daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menginformasikan isi yang dimuat pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Menggambarkan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti dengan

penguraian tugas dan fungsi serta tata kerja dari setiap unit kerja dan dilengkapi dengan struktur organisasi

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan komponen pendukung kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu komposisi sumber daya manusia yang direpresentasikan dari berbagai jenisnya serta aset dan unit usaha yang operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada bidang perpustakaan dan kearsipan melalui peningkatan akses informasi, digitalisasi layanan, dan pembinaan kearsipan yang lebih sistematis.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menerangkan pihak-pihak yang dituju untuk menerima pelayanan dari menerangkan pihak-pihak yang dituju untuk menerima pelayanan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Memuat tentang perangkat Daerah yang menjadi mitra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi dalam melakukan layanan.

2.17 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalin kerjasama terhadap daerah/lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah,

Memuat tentang penggalan masalah-masalah dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi yang selanjutnya dianalisa untuk menentukan prioritas dan sasaran perangkat daerah. Dan menjabarkan permasalahan strategis dari berbagai faktor yang perlu ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2.2 Isu Strategis

Memuat tentang isu strategis yang yang harus dihadapi agar pelayanan perpustakaan dan kearsipan menjadi lebih efektif, merata, dan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia serta akuntabilitas daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Memuat tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang arah kebijakan Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam perencanaan strategis sebagai pedoman yang mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang **perpustakaan** dan **kearsipan** agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan nasional.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dan memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029. melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan mengenai penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya dan capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu di atasi di masa mendatang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan susunan organisasi terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu: Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip.

2.1.1 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Tengah

a. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahi:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
4. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
7. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk karena adanya konsekuensi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tugas

pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi yang mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan

- perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas yang mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan

melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi; f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Fungsional; Kredit Jabatan;
- j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;

- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Dan Konservasi Bahan Perpustakaan

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;

- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan.

Bidang Layanan Ali Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi

- Perpustakaan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan yang mempunyai mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip, Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan yang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- c. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

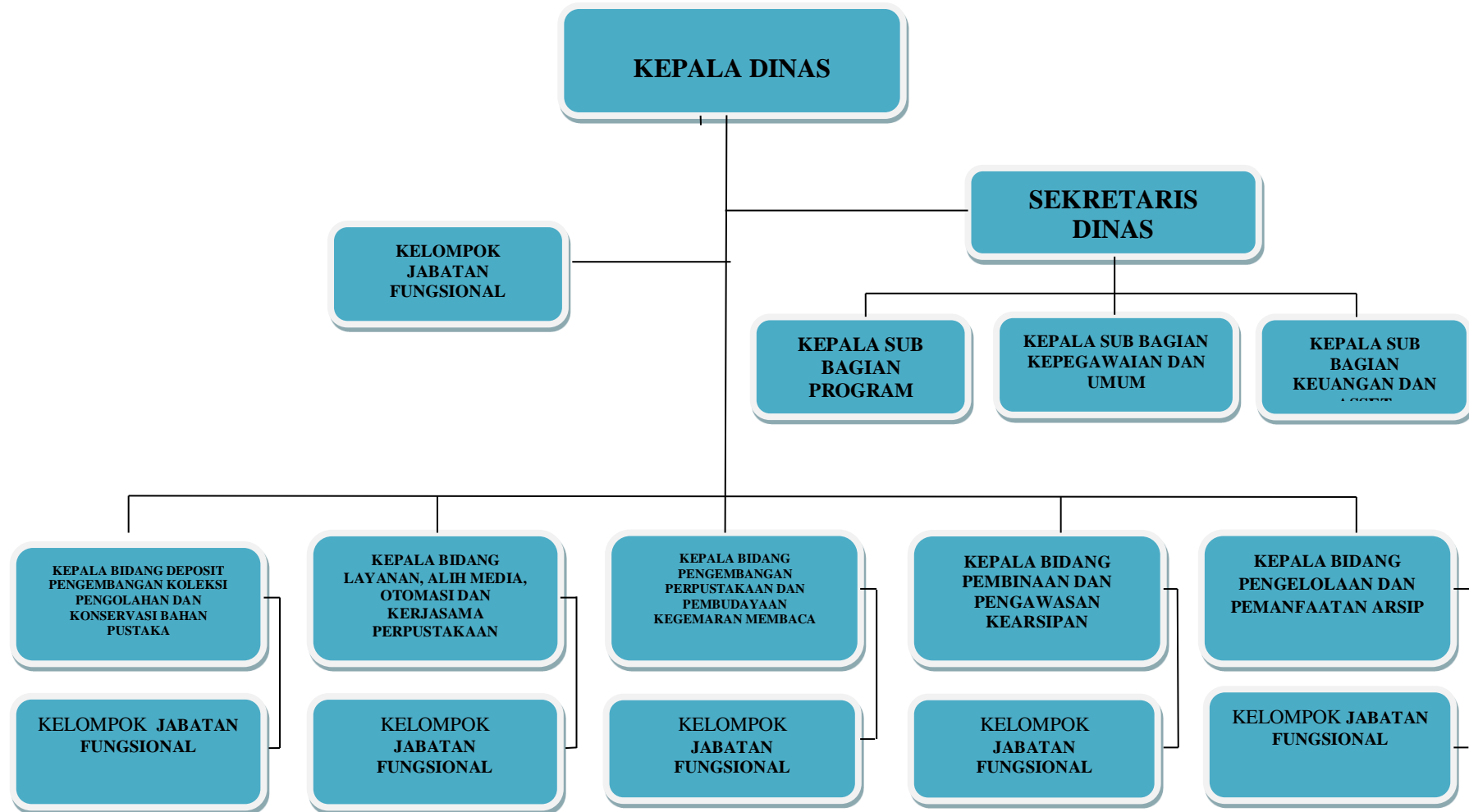
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian terkait.

Susunan/struktur organisasi Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada Gambar di Bawah Ini :

Gambar 2.1 Struktur Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

a. Sumber Daya Manusia

Perubahan Nomenklatur dan Susunan Organisasi memberikan dampak Perubahan Komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan serta arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan. Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 132 orang yang terdiri dari laki-laki 47 orang dan perempuan 85 orang, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki - laki	%	Perempuan	%	
1	PNS	34	38 %	55	62 %	89
2	PPPK	13	30 %	30	70 %	43
Total		47	36 %	85	64 %	132

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

No	Gol/RU	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki -laki	%	Perempuan	%	
1	I/a	0	0	0	0	0
2	I/b	0	0	0	0	0
3	I/c	0	0	0	0	0
4	I/d	0	0	0	0	0
5	II/a	2	100%		0%	2
6	II/b	2	67%	1	33%	3
7	II/c	6	86%	1	14%	7
8	II/d	1	100%	0	0%	1
9	III/a	5	83%	1	17%	6
10	III/b	2	20%	8	80%	10
11	III/c	6	30%	14	70%	20
12	III/d	4	21%	15	79%	19
13	IV/a	3	27%	8	73%	11
14	IV/b	3	43%	4	57%	7
15	IV/c	0	0%	3	100%	3
16	IV/d	0	0	0	0	0
17	IV/e	0	0	0	0	0
18	I	0	0	0	0	0

19	III	0	0	0	0	0
20	V	1	17%	5	83%	6
21	VII	2	50%	2	50%	4
22	IX	10	30%	23	70%	33
23	X					
TOTAL	47	36%	85	64%	132	

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah
		PNS	P3K	%	PNS	P3K	%	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA / SMK	14	1	58%	6	5	42%	26
4	D1	0	0	0	0	0	0	0
5	D2	0	0	0	0	0	0	0
6	D3	2	2	50%	2	2	50%	8
7	S1 / D4	11	10	26%	37	23	74%	81
8	S2	7		41%	10		59%	17
9	S3	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		34	13	36%	55	30	64%	132

Tabel 2.4 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Eselon	Formasi	Terisi	Lowong
1	I.b			
2	II.a	1	0	1
3	II.b	0	0	0
4	III.a	6	6	0
5	III.b	0	0	0
6	IV.a	3	3	0
7	IV.b	0	0	0
TOTAL		10	9	1

Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenis Kelamin

No	Eselon	Formasi	Terisi	Lowong
1	I.b	0	0	0
2	II.a	0	0	0
3	II.b	0	0	0
4	III.a	2	4	6
5	III.b	0	0	0
6	IV.a	1	2	3
7	IV.b			
TOTAL		3	6	9

Tabel 2.6 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Eselon			
		I	II	III	IV
1	SMA / SMK	0	0	0	0
2	D1 - D3	0	0	0	0
3	S1 / D4	0	0	4	2
4	S2	0	0	2	1
5	S3	0	0	0	0
TOTAL		0	0	6	3

Tabel 2.7 Jumlah Jenis Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural	3	6	9
2	Fungsional	12	29	41
3	Pelaksana	32	50	82
TOTAL		47	85	132

Tabel 2.8 Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang Ahli dan Jenis Kelamin						Jumlah Ahli +Trampil
		Ahli		Jml	Terampil		Jml	
		L	P		L	P		
1	Pustakawan	3	15	18	0	2	2	20
2	Arsiparis	3	8	11	2	2	4	15
3	Analisis SDM Aparatur	1	1	2	0	0	0	2
4	Perencana	1	1	2	0	0	0	2
5	Pranata Komputer	2	0	2	0	0	0	2
Total		10	25	35	2	4	6	41

b. Asset dan Unit Usaha yang masih Operasional

Aset yang tersedia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Gedung dan bangunan terdiri dari :
 - a. Gedung Perpustakaan A seluas 994 M²
 - b. Gedung Perpustakaan B seluas 400 M²
 - c. Gedung Arsip seluas 750 M²
 - d. Gedung Kantin seluas 50 M²

2. Tanah :

a. Sebidang Tanah dengan Ukuran : 7.865,-alamat: Jl. Banteng No.6, Kec. Palu Selatan, Kota Palu

b. Sebidang Tanah dengan Ukuran : 1.863,-alamat : Jl. Karajalembah No.6, Kec. Palu Selatan, Kota Palu

3. Peralatan dan Mesin

a. Alat angkut roda 4 (empat) : 12 Mobil

b. Alat angkut roda 2 (dua) : 21 Motor

c. Alat kantor rumah tangga : 2.559

d. Alat studio dan komunikasi : 6 buah

4. Aset tetap lainnya

a. Buku : 74.237 buah

Sedangkan sarana dan prasarana yang tersedia yang mendukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

1. Aksebilitas kaum difable : 8 M2

2. Ruang baca anak : 150 M2

3. Ruang Simpan Buku Perpustakaan Keliling : 200 M2

4. Ruang Baca Remaja : 150 M2

5. Ruang Baca Dewasa : 100 M2

6. Ruang Kepala Bidang : 75 M2

7. Ruang Refrensi : 190 M2

8. Ruang Baca koran/Majalah/Terbitan Berkala : 150 M2

9. Aula : 300 M2

10. Ruang Rapat : 100 M2

11. Lahan Parkir : 400 M2

Aplikasi yang mendukung kegiatan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Perpustakaan dan kearsipan:

a) Aplikasi Sistem katalog on-line : 1 Unit

b) Wifi Area : 1 Unit

c) Genset : 1 unit

Peralatan kendaraan terdiri :

1. Server : 3 Unit

2. Komputer : 116 Unit

3. Laptop : 42 Unit

4. Infocus : 6 Unit

5. Mobil Perpustakaan Keliling : 4 Unit

Sarana Prasarana Kearsipan terdiri dari :

1. Ruang Layanan Pengguna Arsip : 100 M2

2. Ruang Records Centre Dispusaka : 100 M2

3. Ruang Sekretariat Arsiparis Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah : 50 M2

4. Arsip Inaktif keuangan Rutin dan Kepegawaian:150 M2

Peralatan Kendaraan terdiri dari :

1. Rak Besi : 148 Unit

2. Komputer : 116 Unit

3. Filling Kabinet : 72 Unit

4. Lemari Arsip Peta/Gambar : 6 Unit

5. Lemari Arsip Vital : 6 Unit

6. Alat pemadam api tabung : 3 Unit

7. Mesin absen digital : 2 Unit

8. CCTV : 5 Unit

c. Pendayagunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan

Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawes Tengah untuk masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari produk jasa layanan. Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Layanan Sirkulasi

Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.

2. Layanan Referensi

Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.

3. Layanan Perpustakaan Digital

Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital edutainment dalam format VCD/DVD.

4. Layanan Wisata Perpustakaan

Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukas.

5. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent

6. Layanan Informasi Koleksi Terbaru

Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

7. Bimbingan Pemakai.

Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.

8. Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA

9. Pembuatan Sistem Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

10. Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif

11. Pembuatan SOP Kearsipan

Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

12. Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

13. Pembinaan/ Penataan Arsip/ Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembinaan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembinaan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

14. Penyimpanan Arsip/ Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24 jam untuk Magnetic Tape, Catridge, CD-Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital;

15. Perawatan Arsip/Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip/dokumen tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip/dokumen serta pengujian arsip konvensional;

16. Reproduksi Arsip/ Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

17. Alih Media Arsip/ Dokumen

layanann alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

18. Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

19. Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan informasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi.

20. Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti : Boks arsip, rak arsip, folder, guide, microfiche dll.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

a. Kinerja Pelayanan Urusan Perpustakaan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan pada Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2026 - 2029 adalah memberikan pelayanan jasa perpustakaan kepada masyarakat melalui penyediaan koleksi bahan pustaka sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan guna peningkatan Kualitas Ilmu Pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Ada beberapa layanan jasa perpustakaan yang diberikan kepada masyarakat antara lain layanan menetap yaitu layanan penyediaan bahan pustaka dan informasi, selanjutnya dalam rangka perluasan jangkauan layanan perpustakaan guna pemerataan kesempatan memperoleh informasi kepada masyarakat, maka telah dilakukan operasional perpustakaan keliling di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sigi dan Kota Palu melalui mobil unit perpustakaan keliling. Kabupaten Morowali selain adanya Mobil Perpustakaan Keliling juga dilayani dengan Kapal Perpustakaan Keliling KM Pustaka. Sedangkan untuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut belum mendapatkan bantuan mobil perpustakaan keliling sehingga masih di lakukan layanan langsung dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ada pula Layanan Terpusat Perpustakaan Sekolah (LTPS) pada 58 Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan Layanan Bulk Loan System (Sistem Layanan Kotak/Paket) pada 35 Sentra yang ada di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Guna mendayagunakan semua jenis perpustakaan telah dilaksanakan pula pembinaan perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan umum kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan dinas/instansi dan perpustakaan rumah ibadah. Selain itu dalam rangka pelestarian bahan pustaka dilakukan reprografi melalui kegiatan fumigasi dan perbaikan bahan pustaka serta melakukan penelusuran melalui kegiatan hunting koleksi terbitan Sulawesi Tengah atau terbitan tentang Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, penerimaan dan pengelolaan koleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan telah dilakukan pula melalui orientansi perpustakaan, diklat penyetaraan perpustakaan, diklat teknis pengelolaan perpustakaan, magang perpustakaan melalui kerjasama dengan Universitas Terbuka UPBJ Palu, pembinaan dan pengembangan pustakawan yang berdampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat pemakai. Dengan peningkatan layanan perpustakaan dan informasi, diharapkan masyarakat akan lebih banyak menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi, belajar dan penelitian maupun jasa rujukan. Sedangkan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat telah dilaksanakan berbagai kegiatan lomba minat baca, yang dikemas dalam berbagai kegiatan yang diikuti oleh semua jenjang pendidikan mulai anak TK/PAUD, SD/MI, SMP/M.Ts, SMU/SMK/MA/MAK dan masyarakat umum, pemilihan pustakawan berprestasi, seleksi perpustakaan terbaik dan seleksi lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Karakteristik jenis perpustakaan umum yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah contents koleksi dan masyarakat yang mendayagunakan koleksi yang ada bersifat majemuk dan

heterogen. Dengan kata lain orientasi layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada semua segmen masyarakat sehingga orientasi koleksi bahan pustaka yang disediakan juga diarahkan pada semua cakupan subyek /disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh semua kelompok pengguna.

Berdasarkan statistik pendayagunaan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, maka pemustaka (pengguna) dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Anak-anak pra sekolah (Play Group dan TK)
2. Pelajar (Tingkat SD s/d SLTA)
3. Mahasiswa
4. Pegawai Negeri/Swasta
5. Umum (Ibu Rumah Tangga)
6. Guru dan Dosen

Adapun data pendayagunaan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020 - 2024) dideskripsikan melalui tabel berikut

Tabel 2.9 Data Pengunjung Berdasarkan Segmen Masyarakat Pengguna Periode Tahun 2021 s/d 2025

No	Segmen	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Umum	3,616	4,188	2,264	1,931	1,383
2	Pegawai	1,001	995	594	378	
3	Dosen/ Guru	964	1,417	345	371	
4	Mahasiswa	6,780	8,013	3,919	3,537	1,485
5	SLTA	1,076	2,886	1,598	1,445	7,694
6	SLTP	969	3,124	1,383	1,106	
7	SD/ TK	5,190	10,910	10,936	14,722	
Jumlah		19,596	31,533	21,039	23,490	10,562

b. Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan

Adapun jenis pelayanan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu layanan peminjaman arsip dan penerbitan naskah sumber arsip serta layanan jasa

kearsipan. Layanan arsip dan penerbitan naskah sumber arsip adalah bentuk pemberian layanan peminjaman fisik maupun informasi arsip bagi para pengguna arsip sedangkan layanan jasa kearsipan adalah bentuk layanan yang diberikan bersifat teknis seperti layanan jasa pembenahan arsip, layanan jasa penyimpanan arsip, layanan jasa alih media arsip dan layanan jasa lainnya dibidang kearsipan.

Arsip adalah bukti kinerja organisasi yang merupakan bahan pertanggung jawaban yang autentik dan terpercaya, maka Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan akses arsip kepublik untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan kearsipan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun di luar Provinsi Sulawesi Tengah terutama pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANR) dan lembaga lainnya, Pembinaan dan apresiasi kearsipan serta penyuluhan/sosialisasi bagi pelajar dan mahasiswa tentang pengelolaan arsip serta sosialisasi sadar arsip melalui layanan arsip keliling. Kemudian disadari bahwa arsip adalah memori kolektif dan jati diri daerah, maka perlu adanya pelestarian melalui restorasi, reprografi dan fumigasi arsip serta melakukan penilaian dan Penjadwalan Retensi Arsip (JRA) dan penyusutan arsip melalui pemusnahan.

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan baik di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem

penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Untuk mensukseskan gerakan sadar arsip yang sudah dicanangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pembinaan kepada perangkat daerah provinsi maupun LKD kabupaten/kota dalam hal kearsipan, adapun yang sudah dibina meliputi :

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- g. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
- h. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
- i. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- j. Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah
- k. Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
- l. Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
- m. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah

LKD kabupaten/kota:

- a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Donggala
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toli Toli
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buol
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara

- i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali
- j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Touna
- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.10 Data Arsip Hasil Akuisisi

OPD / Organisasi/ BUMN.BUMD	Jumlah Box	Jumlah (berkas)	Kategori Arsip	Tahun akuisisi	Kegiatan	Ket
Biro Umum	28	1203	statis	akuisisi tahun 2016		
Arsip Foto		247	statis	akuisisi tahun 2016		
Sub Bagian Umum Dispusarda	2	51	statis	akuisisi tahun 2016		
Arsip Foto		21	statis	akuisisi tahun 2017		
Arip Tekstual		6	statis	akuisisi tahun 2017		
Peta		9	statis	akuisisi tahun 2018		
Kumpulan SK Gubernur		6	statis	akuisisi tahun 2018		
Biro Pemerintahan	5	68	statis	akuisisi tahun 2018	Perlindungan & penyelamatan arsip	Likui dasi
Dinas Sosial	22	714	statis	akuisisi tahun 2018	Penyusutan	
BPKAD (eks biro Keuangan)	13	136	statis	akuisisi tahun 2018	Penyusutan	
Biro Ekonomi	11	424	statis	akuisisi tahun 2018	Penyusutan	

Secara umum pengertian Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian arsip dinamis dan arsip statis. Adapun Pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengelolaan arsip dinamis inaktif perangkat daerah dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan pengelolaan arsip statis.

Sedangkan pada sektor pemeliharaan dan pelestarian arsip preservasi arsip statis (pemeliharaan dan pelestarian) dilakukan untuk menghadapi masalah yang

serius karena kerusakan yang disebabkan oleh berbagai factor perusak. Sumber kerusakan arsip statis dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor perusak internal dapat disebabkan oleh penyusun bahan dasar arsip itu sendiri diantaranya penggunaan bahan–bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan bahan dasar arsip (misal lignin dan alum rosin), dan penggunaan tinta yang bersifat asam. Faktor perusak eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan tempat arsip statis disimpan seperti suhu dan kelembaban yang tidak stabil, sinar ultraviolet, dan polusi udara, hama perusak arsip statis seperti jamur/kapang, serangga, dan binatang pengerat, serta factor manusia seperti ketidakpedulian ketika menangani arsip dan pencurian. Oleh karena itu dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan dari berbagai factor perusak arsip, baik yang bersumber dari faktor internal dan eksternal diperlukan suatu tindakan preservasi arsip statis (preventif dan kuratif) yang sesuai dengan kaidah, standar preservasi arsip statis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak. Preservasi ditinjau dari tindakannya terdiri atas preservasi preventif dan preservasi kuratif. Preservasi preventif (pemeliharaan) adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip.

Preservasi kuratif (Pelestarian) adalah preservasi yang bersifat perbaikan/perawatan terhadap arsip yang mulai/sudah rusak atau kondisinya memburuk, sehingga dapat memperpanjang usia arsip.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sasaran layanan yang dapat kami klasifikasikan berdasarkan urusannya, sebagai berikut:

- a. Sasaran Layanan Bidang Perpustakaan kepada:
 - 1. Masyarakat/pemustaka baik yang datang ke perpustakaan umum daerah maupun ke desa-desa/sekolah yang diberikan layanan dengan mobil perpustakaan keliling,
 - 2. Perpustakaan Sekolah, perpustakaan Khusus/perpustakaan pondok pesantren dan Perpustakaan Desa.
- b. Sasaran Layanan Bidang kearsipan kepada :
 - 1) Masyarakat yang memerlukan arsip dapat meminjam dan melihatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 - 2) Perangkat Daerah (PD), Ormas, Desa/kelurahan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah tidak bisa bekerja sendiri sehingga memerlukan kerja sama atau kemitraan dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Mitra-mitra ini berperan dalam mendukung, memperluas, dan memperkuat layanan yang diberikan. Berikut adalah beberapa mitra strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Instansi Pemerintah Lainnya
 - 1) **Dinas Pendidikan:** Mendukung pengembangan literasi di sekolah-sekolah.
 - 2) **Dinas Komunikasi dan Informatika:** Bekerja sama dalam pengembangan layanan digital perpustakaan dan arsip,
 - 3) **Dinas Sosial:** Menjangkau kelompok masyarakat rentan agar bisa mengakses layanan perpustakaan.
- b. Lembaga Pendidikan
 - 1) Sekolah dan Universitas: Menjadi mitra dalam pengembangan koleksi, pelatihan literasi informasi, dan program literasi baca,
 - 2) Perguruan Tinggi: Mendukung riset dan penyediaan tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kearsipan.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas

Komunitas literasi dan penggiat arsip sering bekerja sama dalam kegiatan seperti:

- 1) Gerakan membaca,
- 2) Pelatihan menulis,
- 3) Pendokumentasian sejarah local,
- 4) Pelestarian arsip masyarakat.

d. Perpustakaan dan Arsip Swasta

Perpustakaan umum/swasta, taman bacaan masyarakat (TBM), hingga lembaga arsip swasta bisa menjadi mitra dalam memperluas jangkauan layanan

e. Media Massa

Mendukung promosi layanan perpustakaan dan kesadaran pentingnya arsip melalui berbagai saluran informasi.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Dalam konteks pemerintahan daerah, kerja sama daerah merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan berbagai pihak, baik internal antar-daerah maupun eksternal lintas sektor, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang perpustakaan dan kearsipan. Sebagai instansi teknis di tingkat provinsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab dalam menjalin, mengelola, dan mengevaluasi kerja sama yang relevan dengan fungsi utamanya, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip daerah.

Jenis-Jenis Kerja Sama yang Dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

a. Kerja Sama Antar-Daerah (Kabupaten/Kota) di Provinsi

- 1) Pendampingan perpustakaan desa atau kelurahan oleh dinas provinsi kepada dinas kab/kota,

- 2) Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan dan arsip di daerah,
 - 3) Integrasi sistem informasi perpustakaan dan kearsipan antar-kabupaten/kota dengan provinsi,
 - 4) Digitalisasi arsip dan koleksi lokal untuk memperkuat pelestarian warisan budaya daerah.
- b. Kerja Sama Lintas Provinsi
- a. Kegiatan literasi bersama, seperti festival literasi antar provinsi, seminar, atau workshop regional,
 - b. Penyelarasan kebijakan pengelolaan arsip daerah antarprovinsi dalam satu kawasan atau wilayah.
- c. Kerja Sama dengan Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI
- 1) Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
 - 2) Pendampingan teknis dan standarisasi pengelolaan arsip oleh ANRI.
 - 3) Sinkronisasi data dan pelaporan kinerja sektor perpustakaan dan kearsipan.
- d. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi
- 1) Kolaborasi riset di bidang dokumentasi, arsip, sejarah lokal, dan literasi,
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM melalui program magang, PKL, atau pelatihan bersama.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi Peran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan daerah adalah meningkatkan pembangunan masyarakat melalui upaya pembinaan perpustakaan di masyarakat dan sekolah menengah, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah, pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis serta perlindungan dan penyelamatan arsip secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pemanfaatan koleksi perpustakaan dan arsip berbasis digital (literasi digital).

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tengah, maka untuk menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan informasi perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan belum berjalan secara optimal

Upaya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberdayakan semua jenis perpustakaan tidak dapat berjalan secara optimal karena terdapat faktor-faktor penghambat, seperti :

- 1) Jumlah perpustakaan yang perlu dibina dan dikembangkan sebanyak 2.620 unit, namun yang sudah dilakukan kegiatan pembinaan sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 1.749 unit atau 66,75 %
- 2) Perpustakaan Umum Kab/Kota sebagai mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan berbagai jenis perpustakaan di

daerah belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

b. Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Terbatas

Substansi tugas yang diemban oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan pada lima aspek, yaitu;

- 1) Pengembangan Perpustakaan, Sumberdaya Manusia dan Pembudayaan Kegemaran Membaca,
- 2) Deposit, Pelestarian, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, baik koleksi umum maupun koleksi yang memiliki kandungan isi mengenai kearifan lokal (*heritage*),
- 3) Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan.
- 4) Pengelolaan Arsip, dan
- 5) Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan.

Kelima aspek tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena masih terkendala oleh rendahnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Permasalahan SDM di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menyangkut hal-hal berikut :

- 1) Jumlah tenaga pembina perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan yang akan dibina. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki tenaga pembina sebanyak 28 orang (tenaga fungsional pustakawan). Tenaga arsiparis sebanyak 8 orang, sedangkan jumlah perpustakaan yang perlu dibina sebanyak 2.620 unit.
- 2) Kemampuan teknis SDM Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal perawatan dan pelestarian koleksi bahan perpustakaan masih sangat terbatas.
- 3) Rasio jumlah pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah pemustaka yang berkunjung dan

mendayagunakan jasa layanan perpustakaan sangat tidak seimbang. Pegawai Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas pada sektor layanan berjumlah 23 orang termasuk pejabat fungsional pustakawan, sedangkan jumlah pemustaka yang berkunjung pada tahun 2020 sebanyak 112.440 orang, dan

- 4) Kemampuan staf Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang aplikasi teknologi informasi, khususnya dalam hal aplikasi layanan perpustakaan digital masih sangat terbatas sehingga berdampak pada terbatasnya aplikasi teknologi informasi yang dimanfaatkan di perpustakaan.

c. Upaya Pengembangan Koleksi Deposit Belum Optimal

Salah satu fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai perpustakaan deposit yang bertugas untuk menghimpun, mengolah, melestarikan dan mendayagunakan hasil karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh instansi pemerintah/swasta dan perorangan dalam wilayah Sulawesi Tengah. Tugas dan tanggungjawab tersebut secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor. 70/1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 23/1999 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala, seperti :

- 1) Masih rendahnya kesadaran instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menyerahkan hasil karyanya ke Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan,
- 2) Karya cetak, khususnya naskah kuno (manuskrip) yang dimiliki oleh perorangan di daerah Kabupaten/Kotasangat sulit dikumpulkan karena adanya anggapan bahwa naskah kuno atau manuskrip tersebut merupakan harta warisan dan bernilai magic.

d. Minat Baca dan Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan masih rendah

Minat baca dan apresiasi masyarakat di Sulawesi Tengah terhadap perpustakaan dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya animo masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan umum Kab/Kota serta belum membudayanya aktivitas membaca di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan minat baca untuk semua elemen masyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan.

e. Layanan Kearsipan yang belum maksimal

- 1) Belum lengkapnya sarana dan prasarana layanan kearsipan berbasis TIK.
- 2) Beragamnya sasaran layanan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan,
- 3) Perlu adanya standarisasi layanan prima untuk kearsipan berbasis TIK,
- 4) Perlunya disusun kajian kerjasama layanan jasa kearsipan (layanan system kearsipan. Layanan pembenahan arsip. Layanan penyimpanan, layanan pemeliharaan, dan layanan pengendalian arsip),
- 5) Perlunya disusun prosedur tetap Layanan Kearsipan,
- 6) Memberikan akses dan layanan arsip statis dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan khazanah arsip yang dikelola, dan
- 7) Perlunya penyediaan jasa reproduksi arsip baik arsip kertas maupun non kertas.

f. Pembinaan Kearsipan belum maksimal

- 1) Penyelenggaraan Tata Kelola Kearsipan yang belum terpadu pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
- 2) Besarnya pemenuhan kebutuhan Tenaga Fungsional Arsiparis dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
- 3) Belum terpenuhinya standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis

dan para Pengelola Arsip Perangkat Daerah,

- 4) Perlu regulasi yang lengkap tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dari mulai penciptaan arsip sampai dengan penyusutan arsip,
 - 5) Perlu adanya regulasi mengenai pengelolaan Arsip-arsip Aset Daerah,
 - 6) Kurangnya kualitas SDM dibidang pengembangan Sistem Kearsipan,
 - 7) Belum tersedianya Master Plan Pengembangan Sistem Kearsipan Provinsi, dan
- Perlu dibangunnya Sistem Monitoring berbasis TIK untuk pengendalian kearsipan.

g. Akuisisi dan Pengelolaan Arsip belum optimal

- 1) Kurang lengkapnya koleksi arsip yang bernilai sejarah dan khasanah budaya Sulawesi Tengah,
- 2) Perlu regulasi mengenai pengelolaan arsip vital dan dokumen penting serta pelestariannya,
- 3) Belum terlaksanakannya akuisisi dan pengelolaan arsip-arsip yang menyangkut asset daerah,
- 4) Perlu adanya standarisasi pengelolaan arsip yang terukur dan pelaksanaan Alih Media berbasis TIK yang handal untukantisipasi perubahan media arsip dan perlakuan terhadap arsip media baru, dan
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana pemnyimpanan arsip menurut jenis media arsipnya, peralatan, perawatan dan pemeliharaan arsip.

2.2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta pengelolaan kearsipan yang baik dan benar adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing dalam berbagai bidang

kehidupan. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ingin dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Berikut tabel isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Yang Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa dan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan belum berjalan secara optimal	Minimnya Anggaran dan Prioritas Pembangunan Perpustakaan	Kurangnya interoperabilitas sistem informasi kearsipan dan Tantangan dalam pengelolaan data digital jangka panjang	Pembangunan budaya literasi belum merata dan Pengelolaan arsip belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance.	Perpustakaan desa tidak aktif karena kekurangan buku dan tenaga pengelola dan Arsip pemerintah daerah tidak tertata dengan baik, berisiko hilang atau rusak.	Kegiatan Rendahnya kualitas layanan perpustakaan, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (pustakawan/arsiparis), kurangnya infrastruktur pendukung, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan dan pengelolaan arsip.
Pembinaan dan pengembangan SDM pustakawan dan arsiparis merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah	Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Terbatas	Masih banyak petugas tidak memiliki latar belakang profesi atau pelatihan yang sesuai	Kesenjangan Kompetensi SDM dalam Transformasi Digital Perpustakaan dan Arsip	Rendahnya Profesionalisme SDM Perpustakaan dan Arsip dalam Mendukung Pembangunan Literasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Keterbatasan SDM Ahli Perpustakaan dan Kearsipan di Daerah Menghambat Pemerataan Layanan Informasi	Rendahnya kualitas layanan publik, tidak optimalnya pengelolaan arsip daerah, serta lambatnya transformasi digital di sektor informasi dan literasi.
Digitalisasi dan Inovasi Layanan	Upaya Pengembangan Koleksi Deposit Belum Optimal	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Transformasi Digital dan Akses Pengetahuan	Banyak perpustakaan di desa atau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) belum memiliki akses listrik stabil dan internet	Belum Maksimalnya Digitalisasi dan Akses Informasi di Wilayah Pedesaan	Menjangkau layanan perpustakaan ke wilayah pedalaman dan penguatan perpustakaan digital sebagai solusi inklusif
Pengembangan Literasi dan Budaya	Minat Baca dan Apresiasi	Rendahnya minat baca, keterbatasan	Krisis Literasi dan Ketimpangan	Rendahnya Indeks Literasi	Rendahnya Ketersediaan dan	Meningkatkan literasi masyarakat di seluruh lapisan, terutama wilayah 3T

Membaca	Masyarakat terhadap Perpustakaan masih rendah	akses pustaka, dan belum mengakar budaya membaca.	Akses Informasi	Nasiona	Kualitas Perpustakaan Daerah	(tertinggal, terdepan, dan terluar dan strategi efektif untuk menanamkan budaya literasi sejak usia dinio
Pengembangan Sistem Kearsipan Terintegrasi dan Digitalisasi dan Akses Layanan Publik	Layanan Kearsipan yang belum maksimal	Kesenjangan Akses Layanan Perpustakaan	Pelestarian Warisan Budaya dan Arsip Dunia	Minimnya Pengelolaan Arsip yang Profesional	isu regional yang berdampak pada lemahnya sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ketiadaan sistem kearsipan yang baik menyebabkan kesulitan dalam penelusuran dokumen,	Meningkatkan kompetensi SDM pengelola perpustakaan dan arsip di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan
Penguatan Lembaga Kearsipan di Tingkat Daerah dan Pengembangan Kapasitas SDM Kearsipan	Pembinaan Kearsipan belum maksimal	Rendahnya Kualitas Pembinaan Kearsipan Menghambat Terwujudnya Tertib Arsip dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Arsip untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”	Lemahnya pengawasan kearsipan daerah berdampak pada rendahnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Tidak tertibnya pengelolaan arsip OPD di daerah menyebabkan kesenjangan informasi dan risiko kehilangan data penting lokal.	Memperkuat sistem pembinaan, meningkatkan kompetensi SDM, dan mengembangkan sistem informasi kearsipan daerah secara terintegrasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan
Memperkuat tata kelola arsip melalui pengembangan sistem akuisisi yang	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip belum optimal	Keterbatasan Integrasi dan Sinergi antara Pengelolaan	Kesenjangan Kapasitas Pengelolaan Arsip dalam	Keterbatasan Sistem dan Kapasitas Pengelolaan Arsip	Kesenjangan Kapasitas Kearsipan Antar Daerah Menghambat Tata Kelola	Belum Optimalnya Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Menghambat Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”

terstandarisasi,		Arsip dan Perpustakaan dalam Mendukung Pelestarian Informasi dan Pengetahuan Daerah”	Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan	Pemerintah Daerah	Pemerintahan yang Efektif	
------------------	--	--	---	-------------------	---------------------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah erat kaitannya dengan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Visi Misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD 2025 – 2045 tahap pertama. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan dengan menggunakan penyelarasan, ditetapkan tujuan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan proses menetapkan program – program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap Program jangka Panjang selama beberapa tahun ke depan.

Penetapan tujuan Renstra perangkat daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terencana, terukur, dan berkualitas, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, pemanfaatan sumber daya yang ada, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Dalam Renstra, setiap perangkat daerah akan memiliki tujuan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, namun secara umum, tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran, tujuan organisasi, permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran focus dari tujuan Pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja Perangkat Daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Dalam rangka menghadapi permasalahan, isu – isu strategis, tantangan dan

peluang perubahan yang akan terjadi, maka sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mendukung untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dan memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dalam menyambut Indonesia Emas 2045 Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan penguatan fondasi transformasi dan akselerasi transformasi, dan ekspansi global disegala bidang. Provinsi Sulawesi Tengah juga harus menjadi daerah maju sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menghasilkan produk – produk pertanian dan industry berbasis sumber daya alam yang yang mampu berekspansi secara global serta memberikan berbagai sumbangsih yang positif di Tahun 2045. Untuk itu ditetapkanlah Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2045 adalah : **“SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA ALAM YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”**. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, Visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

“BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2025 – 2029”



“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025 – 2029 dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dna Produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, inovatif, kalaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan local.

Dalam rangka mencapai visi, misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator dan sasaran dimaksud sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Provisi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah											
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	71,7	72	73	75	77	80	83	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan	Nilai Dimensi Kepatuhan (Nilai)	21,51	21,6	21,9	22,5	23,1	24	24,9	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja	Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)	50,19	50,4	51,1	52,5	53,9	56	58,1	
		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip	Nilai Aspek Kebijakan (Nilai)	22,71	22,74	22,76	22,78	22,8	23	23,2	
			Nilai Implementasi Kebijakan (Nilai)	49	49,26	50,24	51,22	52,2	53	53,8	
		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	

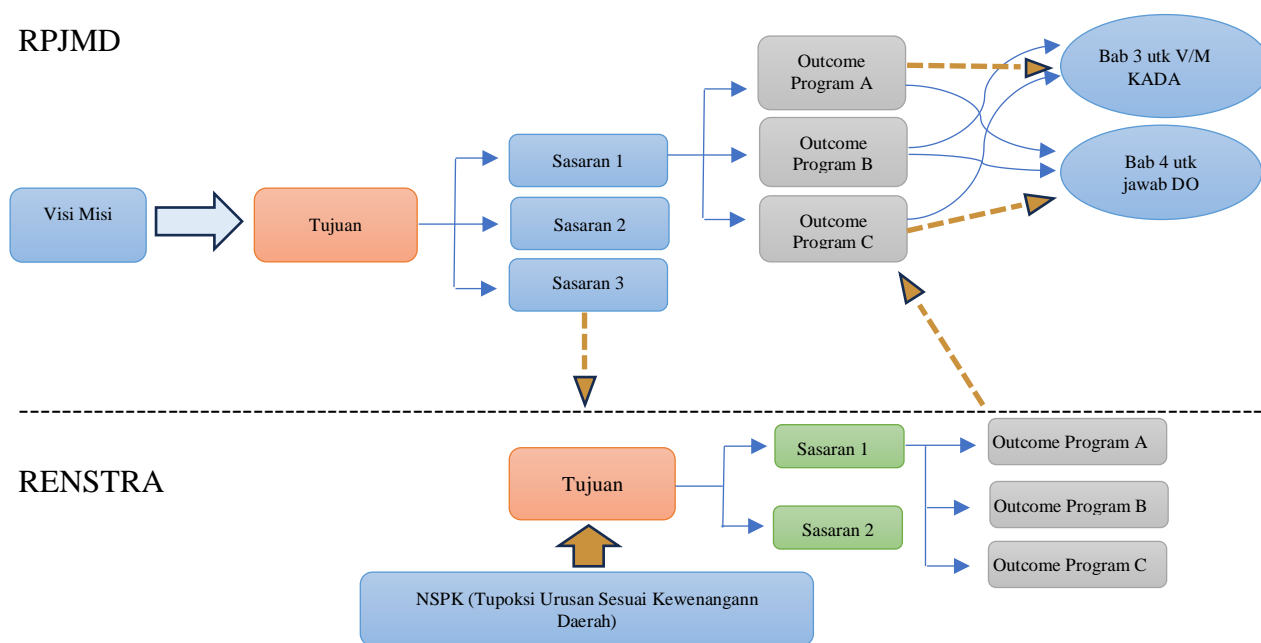
3.2 Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun atas dasar permasalahan dan isu – isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.

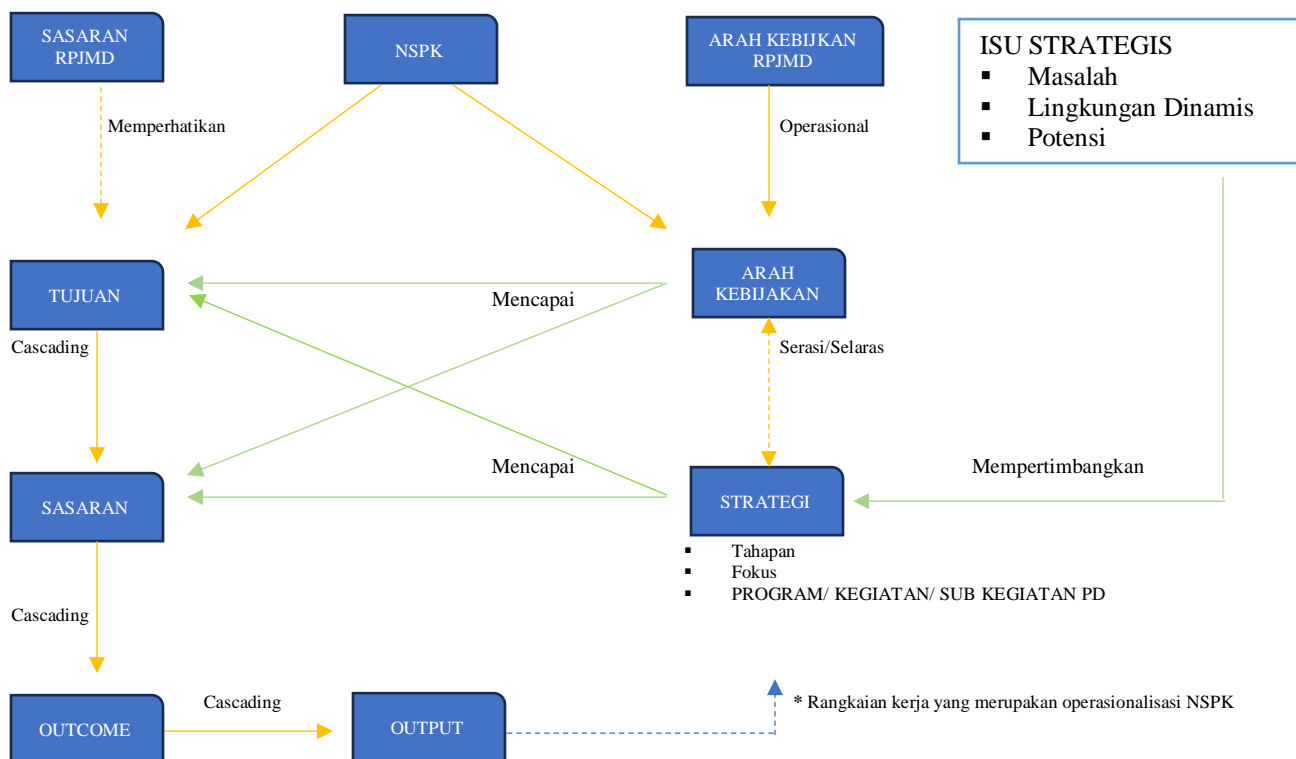
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Renstra berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan RPJMD dengan Renstra terletak pada hubungan hierarkis dan fungsional. Dimana RPJMD menjadi pedoman utama Perangkat Daerah untuk menjabarkan Pembangunan Daerah lebih lanjut ke dalam Renstra. Dalam pencapaian target – target kinerja Renstra Perangkat Daerah secara agregat akan berkontribusi terhadap terwujudnya sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra merupakan dokumen turunan dari RPMJD yang bersidat operasional dan sectoral.

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Gambar 3.2 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Dalam pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan Sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.

Misi 9 : Memperkuat birokrasi yang akuntabel, membangun budaya kerja yang bersih, mencegah terjadinya tindak korupsi dan menjamin seluruh kegiatan pemerintahan berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil telaah Visi, dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 mendatang adalah “*Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip*”. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi

Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

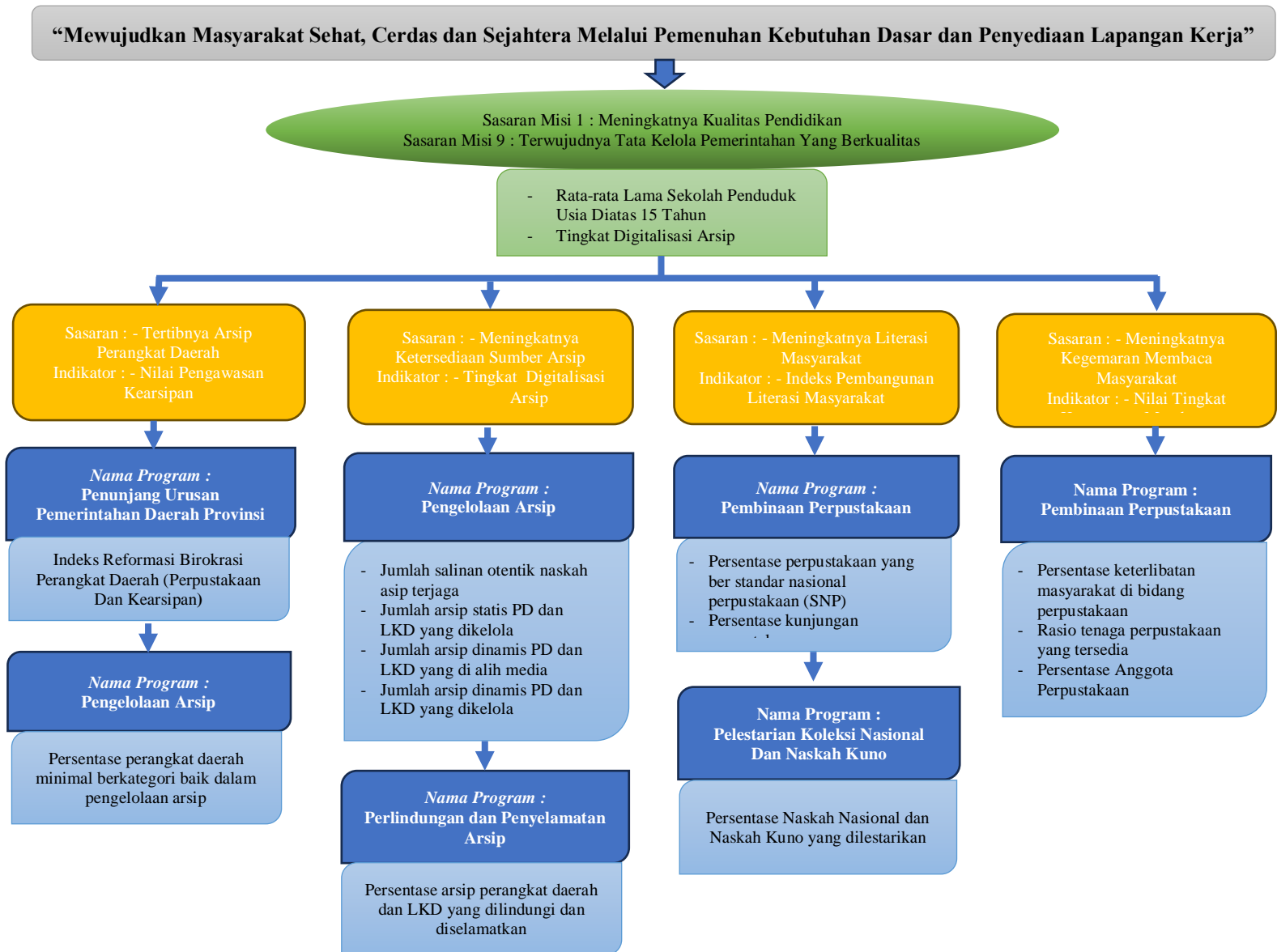
Untuk mencapai tujuan tersebut Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis jangka menengah yang merupakan indikator pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Akses dan Layanan Perpustakaan Berkualitas
- b. Penguatan Budaya Literasi Sejak Dini
- c. Digitalisasi Layanan Informasi dan Edukasi
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan
- e. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan
- f. Pemanfaatan Arsip sebagai Sumber Pembelajaran
- g. Sinergi Program dan Kolaborasi Lintas Sektor.

Adapun Cascading Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3 Cascading Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025 – 2029



3.3 Metadata Indikator Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah

Berikut Metadata Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	:	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan
Rumus Perhitungan	:	Indeks $_{0-100} = 100 \times (W_{Kepatuhan} \times Dim_{Kepatuhan} + W_{Kinerja} \times Di_{Kinerja})$. Dengan bobot : $W_{Kepatuhan} = 0,30$ $W_{Kinerja} = 0,70$
Interpretasi	:	Instrumen baru IPLM 2025 lebih mengukur sejauh mana fasilitas perpustakaan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat melalui variabel layanan dan pengelolaan, termasuk pemanfaatan koleksi, kegiatan penguatan budaya baca, dan jumlah pengunjung. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan keberhasilan dalam program literasi di suatu Instansi.
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus
Frekwensi	:	Tahunan

2. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah

Nama Indikator	:	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah .
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan
Defenisi	:	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.
Rumus Perhitungan	:	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun}) + (30\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip statis}) + (20\% \times \text{Aspek sumber daya kearsipan})$
Interpretasi	:	Interpretasi indeks hasil pengawasan kearsipan yang mengacu pada skala penilaian dan kategori yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) , yang menunjukkan nilai dengan kategori : <ul style="list-style-type: none"> ➤ AA (Sangat memuaskan) : Nilai > 90 - 100 ➤ A (Memuaskan) : Nilai > 80 - 90 ➤ BB (Sangat Baik) : Nilai > 70 - 80 ➤ B (Baik) : Nilai > 60 - 70 ➤ CC (Cukup) : Nilai > 50 - 60 ➤ C (Kurang) : Nilai > 30 - 50 ➤ (Sangat Kurang) : Nilai > 0 - 30
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

3. Nilai Dimensi Kepatuhan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Nama Sasaran	:	Meningkatnya capaian nilai dimensi Kepatuhan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Nama Indikator	:	Nilai Dimensi Kepatuhan dalam IPLM
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	"Nilai Dimensi Kepatuhan" adalah bagian dari penilaian dale Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) , yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu : 1. Variabel koleksi, meliputi : a. Jumlah koleksi tercetak b. Jumlah koleksi elektronik c. Jumlah penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir d. Jumlah penambahan koleksi elektronik e. Komitmen anggaran pengembangan koleksi tercetak dan digital dalam 1 (satu) tahun terakhir. 2. Variabel SDM, meliputi : a. Jumlah fungsional pustakawan sesuai kualifikasi (fungsional/profesional) dan tenaga teknis perpustakaan b. Jumlah tenaga teknis perpustakaan c. Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang perpustakaan dalam satu tahun terakhir d. Komitmen anggaran pengembangan keprofesian (diklat) tenaga perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Rumus Perhitungan	:	$\text{Dimensi Kepatuhan} = \frac{\text{Nilai Sub Variabel koleksi} + \text{Nilai sub variabel SDM}}{2} \times 30\%$
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai dimensi kepatuhan dalam IPLM berarti Pemerintah Daerah Provinsi semakin patuh terhadap standar nasional dan kebijakan terkait pembangunan literasi masyarakat
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus
Frekwensi	:	Tahunan

4. Nilai Dimensi Kinerja dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Nama Sasaran	:	Meningkatnya capaian nilai dimensi Kinerja dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Nama Indikator	:	Nilai Dimensi Kinerja dalam IPLM
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	"Nilai Dimensi Kinerja" adalah bagian dari penilaian dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) , yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu : 1. Variabel layanan , meliputi : a. Koleksi tercetak yang dimanfaatkan b. Koleksi elektronik yang dimanfaatkan c. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi d. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring e. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK f. Jumlah aktivitas kegiatan penguatan budaya baca dan literasi 3. Variabel pengelolaan, meliputi : a. Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan b. Jumlah variasi dan layanan yang tersedia c. Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan

		d. Komitmen anggaran pengembangan layanan dan pengelolaan
Rumus Perhitungan	:	$\text{Dimensi Kinerja} = \frac{\text{Nilai Sub Pelayanan} + \text{Nilai sub Pengelolaan}}{2} \times 70\%$
Interpretasi	:	Interpretasi dimensi kinerja dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di didasarkan pada pengukuran sejauh mana intervensi kebijakan hulu pemerintah telah berhasil menciptakan kondisi hilir literasi di masyarakat, dimana semakin tinggi nilai dimensi kinerja berarti semakin berhasil pemerintah dan pihak terkait dalam pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan literasi
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus
Frekwensi	:	Tahunan

5. Nilai aspek kebijakan dalam tujuan tingkat digitalisasi arsip

Nama Sasaran	:	Meningkatnya capaian nilai digitalisasi arsip
Nama Indikator	:	Nilai aspek kebijakan
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	<p>Nilai aspek kebijakan diukur berdasarkan tingkat kematangan dan efektivitas regulasi internal yang menjadi payung hukum bagi praktik digitalisasi arsip di suatu instansi, bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen kebijakan tersebut yang didasarkan pada keberadaan dan kualitas dokumen formal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan kebijakan formal • Cakupan dan kelengkapan kebijakan • Sosialisasi dan implementasi • Integrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) <p>Komitmen Anggaran dan Sumber Daya</p>
Rumus Perhitungan	:	$\text{Aspek kebijakan} = \frac{\text{Nilai aspek kebijakan}}{700} \times 30\%$
Interpretasi	:	Nilai aspek kebijakan tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki kerangka kebijakan kearsipan digital yang matang dan komprehensif.
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

6. Nilai implementasi kebijakan dalam tingkat digitalisasi arsip

Nama Sasaran	:	Meningkatnya capaian nilai digitalisasi arsip
Nama Indikator	:	Nilai implementasi kebijakan
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.

Defenisi	:	Definisi operasional nilai implementasi kebijakan dalam pengukuran tingkat digitalisasi arsip adalah proses penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional yang terukur untuk mencapai tujuan digitalisasi arsip, yang dinilai berdasarkan indikator : 1. Tingkat Digitalisasi arsip (TDA) 2. Implementasi ABKD (IABKD) 3. JIKN Sumber Daya ABKD (SDABKD)
Rumus Perhitungan	:	Implementasi kebijakan $= \frac{TDA + \text{implementasi ABKD} + JIKN + \text{Sumber Daya ABKD}}{1200} \times 70\%$
Interpretasi	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber Data	:	Internal dan eksternal
Frekwensi	:	Tahunan

7. Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah

Nama Sasaran	:	Meningkatnya capaian nilai pengawasan kearsipan
Nama Indikator	:	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah .
Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan
Defenisi	:	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.
Rumus Perhitungan	:	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah = (15% x Nilai aspek kebijakan)+(25% x Nilai aspek pembinaan) + (10% x Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun) + (30% x Aspek pengelolaan arsip statis) + (20% x Aspek sumber daya kearsipan)
Interpretasi	:	Interpretasi indeks hasil pengawasan kearsipan yang mengacu pada skala penilaian dan kategori yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) , yang menunjukkan nilai dengan kategori : <ul style="list-style-type: none"> ➤ AA (Sangat memuaskan) : Nilai > 90 - 100 ➤ A (Memuaskan) : Nilai > 80 - 90 ➤ BB (Sangat Baik) : Nilai > 70 - 80 ➤ B (Baik) : Nilai > 60 - 70 ➤ CC (Cukup) : Nilai > 50 - 60 ➤ C (Kurang) : Nilai > 30 - 50 ➤ (Sangat Kurang) : Nilai > 0 - 30
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

3.4 Penahapan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra perangkat daerah

Penahapan prioritas Pembangunan Daerah melibatkan berbagai tahapan yang sistematis untuk menentukan program dan kegiatan yang paling penting bagi pencapaian target Pembangunan daerah. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah dan potensi daerah, rumusan tujuan dan sasaran Pembangunan, serta seleksi program prioritas yang relevan. Prioritas Pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran Pembangunan Daerah bertujuan untuk mendukung capaian sasaran Pembangunan daerah, serta meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola kearsipan dan tingkat digitalisasi arsip ini dirancang untuk :

1. Memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap dan terukur,
2. Memastikan ketercapaian indikator kinerja utama dan kunci pada urusan perpustakaan dan kearsipan,
3. Mendukung transformasi kelembagaan berbasis literasi, akuntabilitas arsip, dan digitalisasi layanan publik.

Adapun tahapan prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan tata Kelola transformasi digital Literasi dan Kearsipan	Peningkatan kemitraan/ kerjasama dengan stakeholder Perpustakaan dan Kearsipan	Perluasan literasi dan optimalisasi penyelenggaraan kearsipan	Pemantapan Sarana Prasarana dan kualitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang berdaya saing	Perwujudan dan budaya literasi Masyarakat yang maju dan penyelenggaraan Kearsipan yang berkelanjutan.

Tahapan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahun agar selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Melalui penahapan ini, setiap tahun diarahkan pada focus prioritas yang berbeda namun saling terkait. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.

3.5 Locus Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan wilayah pengembangan kabupaten/Kota sesuai kebutuhan pengembangan daerah

Locus (lokasi fokus) kegiatan dan intervensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada wilayah pengembangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, untuk memperkuat pemerataan literasi masyarakat, pengelolaan arsip daerah, serta transformasi layanan digital, sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah :

- a. Wilayah I (Kota Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong) focus kegiatannya adalah
 - 1) Pusat pengembangan perpustakaan digital dan layanan inklusi social
 - 2) Pusat koordinasi penerapan SRIKANDI dan digitalisasi arsip Perangkat Daerah
 - 3) Percontohan unit kearsipan model untuk kabupaten/kota lain
 - 4) Revitalisasi perpustakaan sekolah dan kelurahan
- b. Wilayah II (Poso, Tojo Una-Una) focus kegiatannya adalah
 - 1) Penguatan budaya literasi berbasis kearifan lokal dan multicultural
 - 2) Pendampingan pengelolaan arsip pada OPD pasca-konflik
 - 3) Pengembangan perpustakaan desa sebagai pusat edukasi masyarakat
- c. Wilayah III(Timur) – Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut Fokus Kegiatan :
 - 1) Peningkatan layanan perpustakaan keliling dan digital
 - 2) Pendampingan unit kearsipan daerah yang memiliki kendala akses geografis
 - 3) Digitalisasi dan pelestarian arsip sejarah kelautan dan migas
- d. Wilayah IV (Morowali, Morowali Utara) Fokus Kegiatan :
 - 1) Penguatan perpustakaan komunitas dan literasi pekerja industry
 - 2) Pembinaan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintahan industry
 - 3) Kolaborasi literasi digital dengan dunia usaha (CSR)
- e. Wilayah V (Kepulauan dan Terpencil) – Buol, Tolitoli focus kegiatan
 - 1) Pelatihan literasi digital masyarakat pesisir
 - 2) Penambahan sarana perpustakaan terapung/keliling
 - 3) Pendampingan pembentukan unit arsip di daerah terpenci

3.6 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Analisis permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan menjadi basis utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah											
-MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat,tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	71,7	72	73	75	77	80	83	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan	Nilai Dimensi Kepatuhan (Nilai)	21,51	21,6	21,9	22,5	23,1	24	24,9	
		Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja	Nilai Dimensi Kinerja (Nilai)	50,19	50,4	51,1	52,5	53,9	56	58,1	
		Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip	Nilai Aspek Kebijakan (Nilai)	22,71	22,74	22,76	22,78	22,8	23	23,2	
			Nilai Implementasi Kebijakan (Nilai)	49	49,26	50,24	51,22	52,2	53	53,8	
		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian program/Kegiatan/SubKegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan 6 (enam) program dari 2 urusan pemerinatahan yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perustakaan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- c. Program Pengelolaan Arsip
- d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- e. Program Perisinan Penggunaan Arsip
- f. Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, yang diselaraskan dengan:

1. Kebijakan Pusat, khususnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, penguatan literasi, transformasi digital, serta pengelolaan kearsipan secara profesional;
2. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM,

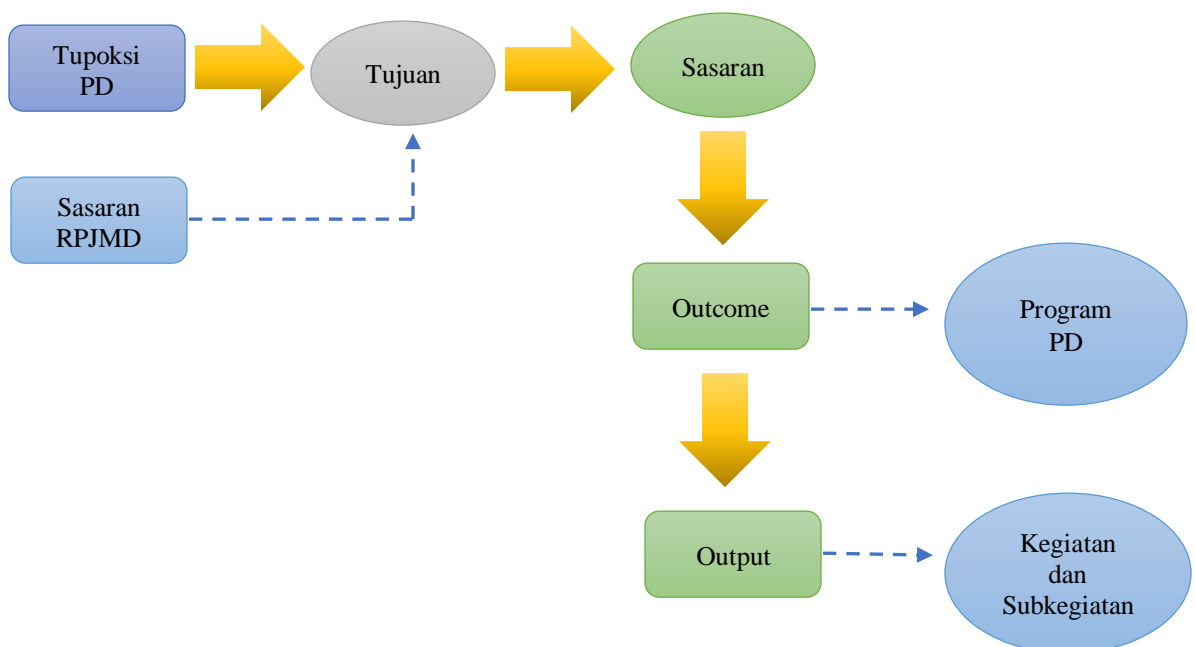
pemerataan akses informasi, dan tata kelola pemerintahan berbasis data dan arsip yang akuntabel;

3. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan penguatan sistem kearsipan daerah.

Dengan arah kebijakan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan informasi dan pengelolaan arsip, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk memberikan kontribusi nyata terhadap visi pembangunan daerah serta mendukung agenda nasional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.

Adapun teknik merumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah serta pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dan beberapa tabel di bawah ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah									
- MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)				
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)				
		Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah				Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)		
							Persentase Prangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
		Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi					Tingkat ketersediaan arsip yang dikelola (Nilai)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
							Jumlah arsiparis (Dokumen)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
							Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
							Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
							Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
							Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
							Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
							Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Arsip yang di Alih Mediasikan dan diautentikasi (Arsip)	2.24.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	
					Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	2.24.02.1.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	
					Jumlah arsiparis (Dokumen)	2.24.02.1.01.0009 - Penyusunan Database Arsiparis	
					Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	2.24.02.1.01.0010 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	2.24.02.1.01.0013 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
				Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	

				Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.1.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
					Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	2.24.02.1.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
					Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	2.24.02.1.02.0004 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis	
					jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	2.24.02.1.02.0006 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pegguna)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	

				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK		Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.1.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	

				Perindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	2.24.03.1.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	
					Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	2.24.03.1.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	2.24.03.1.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	2.24.03.1.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	

				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.1.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
				Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	
				Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
				Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.1.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang				Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
				Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	
				Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2.24.03.1.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.1.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	
				Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.1.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				21.543.010.650		24.864.050.839		26.761.177.917		29.271.665.791		32.130.752.365		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.108.291.984		22.053.999.372		23.736.719.524		25.963.480.495		28.499.442.713		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	75,45	77	19.108.291.984	78	22.053.999.372	79	23.736.719.524	78	25.963.480.495	80	28.499.442.713	2.23.2.24.0.001.00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.23.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.978.940		347.377.000		373.882.250		408.329.600		448.520.650		
Laporan Hasil Capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	9.029.300	1	10.421.300	1	11.216.450	1	12.268.700	1	13.467.000		
2.23.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				9.029.300		10.421.300		11.216.450		12.268.700		13.467.000		

SKPD																		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	9.029.300	1	10.421.300	1	11.216.450	1	12.268.700	1	13.467.000						
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	2	180.587.540	2	208.426.100	2	224.32950	2	244.747.000	2	268.960.350						
	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	2		2		2		2		2				2			
Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

	RKA-SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.23.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				108.352.790		125.055.900		134.597.700		146.597.600		161.224.350	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	108.352.790	2	125.055.900	2	134.597.700	2	146.597.600	2	161.224.350	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERA H	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				18.058.700		20.842.600		22.432.950		24.537.300		26.934.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	18.058.700	1	20.842.600	1	22.432.950	1	24.537.300	1	26.934.000		
2.23.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.048.900		17.368.800		18.694.100		20.447.800		22.445.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	15.048.900	2	17.368.800	2	18.694.100	2	20.447.800	2	22.445.000		
2.23.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.048.900		17.368.800		18.694.100		20.447.800		22.445.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	15.048.900	1	17.368.800	1	18.694.100	1	20.447.800	1	22.445.000		

2.23.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				12.039.100		13.895.000		14.955.300		16.358.200		17.956.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	12.039.100	2	13.895.000	2	14.955.300	2	16.358.200	2	17.956.000		
2.23.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.039.150		13.895.000		14.955.200		16.358.300		17.956.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	12.039.150	12	13.895.000	12	14.955.200	12	16.358.300	12	17.956.000		
Laporan Hasil Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	111.362.100	1	128.529.600	1	138.336.450	1	151.313.900	1	166.093.300		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.23.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				6.019.600		6.947.600		7.477.650		8.179.200		8.978.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	6.019.600	1	6.947.600	1	7.477.650	1	8.179.200	1	8.978.000		
2.23.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90.293.600		104.213.200		112.164.700		122.686.900		134.670.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	90.293.600	1	104.213.200	1	112.164.700	1	122.686.900	1	134.670.300		
2.23.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.048.900		17.368.800		18.694.100		20.447.800		22.445.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	15.048.900	1	17.368.800	1	18.694.100	1	20.447.800	1	22.445.000		
2.23.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.908.750.277		18.388.642.326		19.790.356.399		21.644.370.025		23.762.157.264		
Hasil Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	15.908.750.277	2	18.388.642.326	2	19.790.356.399	2	21.644.370.025	2	23.762.157.264		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	-	129		132		130		130		130			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.23.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.619.588.341		17.744.641.874		18.952.688.043		20.744.369.401		22.874.134.584		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	-	129	15.619.588.341	132	17.744.641.874	130	18.952.688.043	130	20.744.369.401	130	22.874.134.584		
2.23.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72.290.484		161.000.113		209.417.089		225.000.156		222.005.670		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	2	72.290.484	2	161.000.113	2	209.417.089	2	225.000.156	2	222.005.670		

2.23.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				72.290.484		161.000.113		209.417.089		225.000.156		222.005.670		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2	2	72.290.484	2	161.000.113	2	209.417.089	2	225.000.156	2	222.005.670		
2.23.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				72.290.484		161.000.113		209.417.089		225.000.156		222.005.670		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	72.290.484	1	161.000.113	1	209.417.089	1	225.000.156	1	222.005.670		
2.23.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				72.290.484		161.000.113		209.417.089		225.000.156		222.005.670		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	72.290.484	2	161.000.113	2	209.417.089	2	225.000.156	2	222.005.670		
2.23.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				146.211.745		168.751.540		181.672.285		198.865.890		218.070.420		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	146.211.745	1	168.751.540	1	181.672.285	1	198.865.890	1	218.070.420		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

2.23.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				29.242.349		33.750.308		36.334.457		39.773.178		43.614.084		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	29.242.349	2	33.750.308	2	36.334.457	2	39.773.178	2	43.614.084		
2.23.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				29.242.349		33.750.308		36.334.457		39.773.178		43.614.084		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	29.242.349	2	33.750.308	2	36.334.457	2	39.773.178	2	43.614.084		
2.23.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				29.242.349		33.750.308		36.334.457		39.773.178		43.614.084		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	29.242.349	6	33.750.308	6	36.334.457	6	39.773.178	6	43.614.084		
2.23.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				29.242.349		33.750.308		36.334.457		39.773.178		43.614.084		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	29.242.349	1	33.750.308	1	36.334.457	1	39.773.178	1	43.614.084		
2.23.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				29.242.349		33.750.308		36.334.457		39.773.178		43.614.084		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	29.242.349	1	33.750.308	1	36.334.457	1	39.773.178	1	43.614.084		
2.23.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Dokumen Laporan Pengelolaan dan Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.1.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.23.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0		
2.23.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				274.879.421		317.254.446		341.460.960		373.493.691		409.974.389		
Laporan Hasil Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			135.525.000		161.250.000		170.225.000		178.825.000		183.825.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)													
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)													
2.23.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
2.23.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000		25.200.000		25.400.000		25.600.000		25.800.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			25.000.000		25.200.000		25.400.000		25.600.000		25.800.000		

2.23.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			35.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
2.23.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000		25.500.000		27.500.000		30.000.000		32.500.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			20.000.000		25.500.000		27.500.000		30.000.000		32.500.000		
2.23.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45.525.000		50.550.000		52.325.000		53.225.000		50.525.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			45.525.000		50.550.000		52.325.000		53.225.000		50.525.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Hasil Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			39.354.421		21.004.446		6.235.960		9.668.691		6.149.389		
2.23.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				39.354.421		21.004.446		6.235.960		9.668.691		6.149.389		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			39.354.421		21.004.446		6.235.960		9.668.691		6.149.389		
Laporan Hasil Nilai Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			100.000.000		135.000.000		165.000.000		185.000.000		220.000.000		
2.23.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100.000.000		135.000.000		165.000.000		185.000.000		220.000.000		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			100.000.000		135.000.000		165.000.000		185.000.000		220.000.000							
2.23.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				572.796.364		661.097.846		711.539.611		778.289.721		854.308.548							
Laporan Hasil Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000							
2.23.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000							
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000							
Laporan Hasil Nilai Kematangan Penerapan SPBE	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			201.750.000		224.550.000		238.750.000		263.500.000		286.750.000							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)																		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)																		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)																		
2.23.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				23.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000		31.000.000							
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			23.000.000		25.000.000		27.000.000		29.000.000		31.000.000							
2.23.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85.500.000		95.500.000		100.000.000		110.000.000		125.000.000							
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			85.500.000		95.500.000		100.000.000		110.000.000		125.000.000							
2.23.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.750.000		50.550.000		55.250.000		65.000.000		67.250.000							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			45.750.000		50.550.000		55.250.000		65.000.000		67.250.000		
2.23.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.000.000		26.000.000		28.000.000		30.000.000		32.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			22.000.000		26.000.000		28.000.000		30.000.000		32.000.000		
2.23.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.500.000		27.500.000		28.500.000		29.500.000		31.500.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			25.500.000		27.500.000		28.500.000		29.500.000		31.500.000		
Laporan Hasil Penilaian Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			45.250.000		55.250.000		65.250.000		75.250.000		85.250.000		
2.23.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				45.250.000		55.250.000		65.250.000		75.250.000		85.250.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			45.250.000		55.250.000		65.250.000		75.250.000		85.250.000		
Laporan Hasil Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			305.796.364		359.297.846		383.539.611		413.539.721		454.308.548		
2.23.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305.796.364		359.297.846		383.539.611		413.539.721		454.308.548		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			305.796.364		359.297.846		383.539.611		413.539.721		454.308.548		
2.23.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				242.196.491		279.533.161		300.861.541		329.085.607		361.228.781		
Urusan Pemerintah Daerah				242.196.491		279.533.161		300.861.541		329.085.607		361.228.781		
Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada SPSE	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			242.196.491		279.533.161		300.861.541		329.085.607		361.228.781		

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)													
2.23.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.000.000		42.000.000		44.000.000		48.000.000		50.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			38.000.000		42.000.000		44.000.000		48.000.000		50.000.000		
2.23.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				75.500.000		76.500.000		77.500.000		78.500.000		79.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			75.500.000		76.500.000		77.500.000		78.500.000		79.500.000		
2.23.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		
2.23.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.525.000		55.250.000		65.250.000		75.250.000		85.250.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			45.525.000		55.250.000		65.250.000		75.250.000		85.250.000		
2.23.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.171.491		30.783.161		29.111.541		32.335.607		46.478.781		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			18.171.491		30.783.161		29.111.541		32.335.607		46.478.781		

2.23.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.176.478.746		1.357.843.053		1.461.446.478		1.598.545.961		1.754.682.661		
Laporan Hasil Penilaian Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			271.978.746		453.343.053		556.946.478		694.045.961		850.182.661		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
2.23.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				265.000.000		365.000.000		455.000.000		555.000.000		655.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			265.000.000		365.000.000		455.000.000		555.000.000		655.000.000		
2.23.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.978.746		88.343.053		101.946.478		139.045.961		195.182.661		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			6.978.746		88.343.053		101.946.478		139.045.961		195.182.661		
Laporan Penilaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			904.500.000		904.500.000		904.500.000		904.500.000		904.500.000		
2.23.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				904.500.000		904.500.000		904.500.000		904.500.000		904.500.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			904.500.000		904.500.000		904.500.000		904.500.000		904.500.000		
2.23.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.000.000		533.500.000		575.500.000		632.500.000		690.500.000		
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			486.000.000		533.500.000		575.500.000		632.500.000		690.500.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)														
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)														
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)														
2.23.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				185.000.000		187.500.000		189.500.000		201.000.000		210.000.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			185.000.000		187.500.000		189.500.000		201.000.000		210.000.000			
2.23.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				75.500.000		85.500.000		95.500.000		100.500.000		110.500.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			75.500.000		85.500.000		95.500.000		100.500.000		110.500.000			
2.23.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		85.000.000		95.000.000		110.000.000		120.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			75.000.000		85.000.000		95.000.000		110.000.000		120.000.000			
2.23.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.000.000		105.000.000		150.000.000		165.000.000		185.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			95.000.000		105.000.000		150.000.000		165.000.000		185.000.000			
2.23.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.500.000		70.500.000		45.500.000		56.000.000		65.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			55.500.000		70.500.000		45.500.000		56.000.000		65.000.000			
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				2.046.954.437		2.362.510.051		2.542.769.567		2.781.308.849		3.052.970.969			

Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi (%)	2,83	347	2.046.954.437	3,86	2.362.510.051	4,12	2.542.769.567	4,5	2.781.308.849	4,76	3.052.970.969	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	67,48	70		72		74		76		78		
2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				864.942.701		998.281.051		1.074.449.895		1.175.244.913		1.290.036.021	
capaian indeks pembangunan literasi masyarakat	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi (Indeks)			0		0		0		0		0	
2.23.02.1.01.0013 - Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi (Indeks)			0		0		0		0		0		
Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	0	100	45.641.806	130	75.801.671	160	93.030.345	190	115.829.213	200	141.793.871		
2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				45.641.806		75.801.671		93.030.345		115.829.213		141.793.871		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	0	100	45.641.806	130	75.801.671	160	93.030.345	190	115.829.213	200	141.793.871		
Jumlah perpustakaan yang berSNP	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)		1	72.078.558	1	83.190.087	1	89.537.490	1	97.937.075	1	107.503.001		
2.23.02.1.01.0002 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				72.078.558		83.190.087		89.537.490		97.937.075		107.503.001		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya (Perpustakaan)		1	72.078.558	1	83.190.087	1	89.537.490	1	97.937.075	1	107.503.001		

Jumlah perpustakaan yang dibina di satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sulawesi tengah	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)		13	72.078.558	13	83.190.087	13	89.537.490	13	97.937.075	13	107.503.001		
2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				72.078.558		83.190.087		89.537.490		97.937.075		107.503.001		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)		13	72.078.558	13	83.190.087	13	89.537.490	13	97.937.075	13	107.503.001		
Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)		1	72.078.558	1	83.190.087	1	89.537.490	1	97.937.075	1	107.503.001		
2.23.02.1.01.0017 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi				72.078.558		83.190.087		89.537.490		97.937.075		107.503.001		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan (Perpustakaan)		1	72.078.558	1	83.190.087	1	89.537.490	1	97.937.075	1	107.503.001		
Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang tersertifikasi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)		55	72.078.558	55	83.190.087	55	89.537.490	55	97.937.075	55	107.503.001		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.1.01.0006 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				72.078.558		83.190.087		89.537.490		97.937.075		107.503.001		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Orang)		55	72.078.558	55	83.190.087	55	89.537.490	55	97.937.075	55	107.503.001		

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	13	13	275.344.863	13	303.917.367	13	320.239.260	13	341.838.195	13	366.436.287		
	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan (Eksemplar)													
	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0	13		16		20		25		31			
	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi (Nilai)	67,48	69,5		71,59		73,74		75,95		78,23			
2.23.02.1.01.0003 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan (Eksemplar)			0		0		0		0		0		
2.23.02.1.01.0007 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				91.781.621		101.305.789		106.746.420		113.946.065		122.145.429		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)	13	13	91.781.621	13	101.305.789	13	106.746.420	13	113.946.065	13	122.145.429		
2.23.02.1.01.0012 - Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				91.781.621		101.305.789		106.746.420		113.946.065		122.145.429		
Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi (Nilai)	67,48	69,5	91.781.621	71,59	101.305.789	73,74	106.746.420	75,95	113.946.065	78,23	122.145.429		
2.23.02.1.01.0014 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				91.781.621		101.305.789		106.746.420		113.946.065		122.145.429		
Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0	13	91.781.621	16	101.305.789	20	106.746.420	25	113.946.065	31	122.145.429		
Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	4	5	183.563.242	6	202.611.578	7	213.492.840	8	227.892.130	9	244.290.858		
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				91.781.621		101.305.789		106.746.420		113.946.065		122.145.429		

Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0	1	91.781.621	1	101.305.789	1	106.746.420	1	113.946.065	1	122.145.429		
--	---	---	---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.1.01.0015 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				91.781.621		101.305.789		106.746.420		113.946.065		122.145.429		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	4	5	91.781.621	6	101.305.789	7	106.746.420	8	113.946.065	9	122.145.429		
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)		1	72.078.558	1	83.190.087	1	89.537.490	1	97.937.075	1	107.503.001		
2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				72.078.558		83.190.087		89.537.490		97.937.075		107.503.001		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)		1	72.078.558	1	83.190.087	1	89.537.490	1	97.937.075	1	107.503.001		
2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				1.182.011.736		1.364.229.000		1.468.319.672		1.606.063.936		1.762.934.948		
Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)		1	295.502.934	1	341.057.250	1	367.079.918	1	401.515.984	1	440.733.737		
2.23.02.1.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				295.502.934		341.057.250		367.079.918		401.515.984		440.733.737		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)		1	295.502.934	1	341.057.250	1	367.079.918	1	401.515.984	1	440.733.737		
Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)		11	295.502.934	11	341.057.250	11	367.079.918	11	401.515.984	11	440.733.737		
2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				295.502.934		341.057.250		367.079.918		401.515.984		440.733.737		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)		11	295.502.934	11	341.057.250	11	367.079.918	11	401.515.984	11	440.733.737		

Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)		7	295.502.934	7	341.057.250	7	367.079.918	7	401.515.984	7	440.733.737		
2.23.02.1.02.0003 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				295.502.934		341.057.250		367.079.918		401.515.984		440.733.737		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Orang)		7	295.502.934	7	341.057.250	7	367.079.918	7	401.515.984	7	440.733.737		
Jumlah Perangkat Desa/Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Budaya Baca	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)		1	295.502.934	1	341.057.250	1	367.079.918	1	401.515.984	1	440.733.737		
2.23.02.1.02.0001 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				295.502.934		341.057.250		367.079.918		401.515.984		440.733.737		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus (Lokus)		1	295.502.934	1	341.057.250	1	367.079.918	1	401.515.984	1	440.733.737		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				387.764.229		447.541.416		481.688.826		526.876.447		578.338.683		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)	81,11	84,39	387.764.229	86,08	447.541.416	87,8	481.688.826	89,55	526.876.447	91,34	578.338.683	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				105.484.412		121.745.740		131.034.941		143.327.434		157.326.828		
Jumlah eksemplar koleksi cetak dan karya rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	100	144	84.846.951	172	97.926.837	207	105.398.655	248	115.286.188	299	126.546.675		
2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				84.846.951		97.926.837		105.398.655		115.286.188		126.546.675		

Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	100	144	84.846.951	172	97.926.837	207	105.398.655	248	115.286.188	299	126.546.675		
Jumlah penerbit dan produser yang diberikan penghargaan	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produser Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)		6	20.637.461	6	23.818.903	6	25.636.286	6	28.041.246	6	30.780.153		
2.23.03.1.01.0002 - Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produser Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				20.637.461		23.818.903		25.636.286		28.041.246		30.780.153		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produser Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produser Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Penerbit)		6	20.637.461	6	23.818.903	6	25.636.286	6	28.041.246	6	30.780.153		
2.23.03.1.02 - Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah				22.227.092		25.653.590		27.610.958		30.201.166		33.151.040		
Jumlah buku bibliografi daerah yang diterbitkan	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)		20	11.113.546	20	12.826.795	20	13.805.479	20	15.100.583	20	16.575.520		
2.23.03.1.02.0002 - Penerbitan Bibliografi Daerah				11.113.546		12.826.795		13.805.479		15.100.583		16.575.520		
Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan (Naskah)		20	11.113.546	20	12.826.795	20	13.805.479	20	15.100.583	20	16.575.520		
Jumlah buku katalog induk daerah yang diterbitkan	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)		200	11.113.546	200	12.826.795	200	13.805.479	200	15.100.583	200	16.575.520		
2.23.03.1.02.0001 - Penerbitan Katalog Induk Daerah				11.113.546		12.826.795		13.805.479		15.100.583		16.575.520		
Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan (Entry)		200	11.113.546	200	12.826.795	200	13.805.479	200	15.100.583	200	16.575.520		
2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				90.217.743		104.125.582		112.070.364		122.583.776		134.557.047		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah eksemplar koleksi naskah kuno yang diolah dan dialihmediakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)		3	34.724.000	3	41.354.380	3	44.509.719	3	48.685.212	3	53.440.502		

2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				34.724.000		41.354.380		44.509.719		48.685.212		53.440.502		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)		3	34.724.000	3	41.354.380	3	44.509.719	3	48.685.212	3	53.440.502		
Terpenuhinya penyimpanan, perawatan dan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	70	84	55.493.743	93	62.771.202	102	67.560.645	113	73.898.564	124	81.116.545		
2.23.03.1.03.0004 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				55.493.743		62.771.202		67.560.645		73.898.564		81.116.545		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	70	84	55.493.743	93	62.771.202	102	67.560.645	113	73.898.564	124	81.116.545		
2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				169.834.982		196.016.504		210.972.563		230.764.071		253.303.768		
Terpenuhinya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1	1,21	53.014.982	1,331	61.176.751	1,464	65.844.537	1,611	72.021.466	1,771	79.056.106		
2.23.03.1.04.0002 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				53.014.982		61.176.751		65.844.537		72.021.466		79.056.106		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1	1,21	53.014.982	1,331	61.176.751	1,464	65.844.537	1,611	72.021.466	1,771	79.056.106		
Terpenuhinya jumlah Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)			116.820.000		134.839.753		145.128.026		158.742.605		174.247.662		
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1.000	1.210		1.331		1.464		1.611		1.772			
2.23.03.1.04.0001 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis				116.820.000		134.839.753		145.128.026		158.742.605		174.247.662		

Nusantara														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi (Eksemplar)	1.000	1.210	116.820.000	1.331	134.839.753	1.464	145.128.026	1.611	158.742.605	1.772	174.247.662		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.341.213.864		1.547.973.504		1.666.083.882		1.822.380.566		2.000.380.134		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				929.224.243		1.072.472.144		1.154.301.768		1.262.587.756		1.385.910.007		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Persentase Prangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar (%)	8,33	14,58	929.224.243	18,75	1.072.472.144	22,92	1.154.301.768	27,08	1.262.587.756	31,25	1.385.910.007	2.23.2.24.0.00.01.00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tingkat ketersediaan arsip yang dikelola (Nilai)	170,368	171,418		171,943		172,468		172,993		173,518			
2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				601.529.840		694.260.833		747.232.934		817.296.198		897.163.662		
Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	61	61	601.529.840	61	694.260.833	61	747.232.934	61	817.296.198	61	897.163.662		
	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	87	87		87		87		87		87			
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	10	15		17		20		23		25			
	Jumlah arsiparis (Dokumen)	0	1		2		3		4		5			
	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	350	500		600		700		800		1.000			
	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	350	450		500		600		700		800			
	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	350	500		600		700		800		1.000			
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	0	10		20		35		45		61			

	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	0	5	6	6	6	6	6	6		
	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	0	30	35	40	45	50				
2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis				50.000.002	60.666.670	66.333.335	72.050.002	80.666.670			
Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	350	500	50.000.002	60.666.670	66.333.335	72.050.002	80.666.670	1.000		
2.24.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi				50.000.000	60.666.666	66.333.333	72.000.000	77.666.666			
Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi (Arsip)	350	450	50.000.000	60.666.666	66.333.333	72.000.000	77.666.666	800		
2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				90.611.935	95.704.332	99.893.173	110.958.478	125.865.464			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	350	500	90.611.935	600	95.704.332	700	99.893.173	800	110.958.478	1.000	125.865.464		
2.24.02.1.01.0007 - Pemilihan Arsiparis Teladan				37.000.000		40.000.000		43.000.000		45.000.000		47.000.000		
Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan (Orang)	0	30	37.000.000	35	40.000.000	40	43.000.000	45	45.000.000	50	47.000.000		
2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				130.917.903		148.556.499		161.000.000		172.000.000		177.000.000		
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	87	87	130.917.903	87	148.556.499	87	161.000.000	87	172.000.000	87	177.000.000		
2.24.02.1.01.0009 - Penyusunan Database Arsiparis				5.000.000		6.300.000		7.300.000		7.350.000		8.000.000		
Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	0	1	5.000.000	2	6.300.000	3	7.300.000	4	7.350.000	5	8.000.000		
2.24.02.1.01.0010 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis				50.000.000		60.666.666		66.333.333		72.000.000		77.666.666		
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	10	15	50.000.000	17	60.666.666	20	66.333.333	23	72.000.000	25	77.666.666		

2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				18.000.000		25.200.000		28.039.760		36.000.000		43.200.000		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	0	10	18.000.000	20	25.200.000	35	28.039.760	45	36.000.000	61	43.200.000		
2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				164.000.000		188.000.000		200.000.000		220.437.718		250.098.196		
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	61	61	164.000.000	61	188.000.000	61	200.000.000	61	220.437.718	61	250.098.196		
2.24.02.1.01.0013 - Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip				6.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000		
Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip (Lembaga)	0	5	6.000.000	6	8.500.000	6	9.000.000	6	9.500.000	6	10.000.000		
2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				95.388.343		110.093.275		118.493.392		129.619.619		142.268.844		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	250	350	95.388.343	400	110.093.275	450	118.493.392	500	129.619.619	600	142.268.844		
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	7	10		15		20		25		30			
	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	200	300		350		400		450		500			
	Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	25	35		40		45		50		55			
	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	250	350		400		450		500		600			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.1.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				45.388.343		50.093.275		55.493.392		60.619.619		65.268.844		

Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI (Arsip)	7	10	45.388.343	15	50.093.275	20	55.493.392	25	60.619.619	30	65.268.844		
2.24.02.1.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				12.500.000		15.000.000		15.750.000		17.250.000		19.250.000		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai (Orang)	25	35	12.500.000	40	15.000.000	45	15.750.000	50	17.250.000	55	19.250.000		
2.24.02.1.02.0004 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip				12.500.000		15.000.000		15.750.000		17.250.000		19.250.000		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Arsip)	200	300	12.500.000	350	15.000.000	400	15.750.000	450	17.250.000	500	19.250.000		
2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis				12.500.000		15.000.000		15.750.000		17.250.000		19.250.000		
Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	250	350	12.500.000	400	15.000.000	450	15.750.000	500	17.250.000	600	19.250.000		
2.24.02.1.02.0006 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				12.500.000		15.000.000		15.750.000		17.250.000		19.250.000		
terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi (Arsip)	250	350	12.500.000	400	15.000.000	450	15.750.000	500	17.250.000	600	19.250.000		
2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				232.306.060		268.118.036		288.575.442		315.671.939		346.477.501		
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	5	10	232.306.060	15	268.118.036	20	288.575.442	25	315.671.939	30	346.477.501		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		2		2			
2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				182.306.060		200.118.036		215.575.442		237.671.939		261.477.501		
Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	5	10	182.306.060	15	200.118.036	20	215.575.442	25	237.671.939	30	261.477.501		

2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				50.000.000		68.000.000		73.000.000		78.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	50.000.000	1	68.000.000	1	73.000.000	2	78.000.000	2	85.000.000		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				128.225.764		147.992.867		159.284.723		174.227.352		191.244.870		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	1,46	1,88	128.225.764	2,01	147.992.867	2,15	159.284.723	2,29	174.227.352	2,43	191.244.870	2.23.2.24.0.00.01.000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
2.24.03.1.01 - Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				39.050.760		45.070.771		48.509.670		53.060.402		58.243.035		
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	1	1	39.050.760	1	45.070.771	1	48.509.670	1	53.060.402	1	58.243.035		
	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	17	20		23		25		27		30			
2.24.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun				9.000.000		10.000.000		11.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	1	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
2.24.03.1.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				30.050.760		35.070.771		37.509.670		40.060.402		43.243.035		
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	17	20	30.050.760	23	35.070.771	25	37.509.670	27	40.060.402	30	43.243.035		

2.24.03.1.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi				20.941.891		24.170.263		26.014.455		28.454.892		31.234.201		
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan	250	350	20.941.891	400	24.170.263	450	26.014.455	500	28.454.892	600	31.234.201		
2.24.03.1.02.0002 - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana				20.941.891		24.170.263		26.014.455		28.454.892		31.234.201		
Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan	250	350	20.941.891	400	24.170.263	450	26.014.455	500	28.454.892	600	31.234.201		
2.24.03.1.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota				17.532.523		20.235.312		21.779.268		23.822.396		26.149.229		
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	200	300	17.532.523	350	20.235.312	400	21.779.268	450	23.822.396	500	26.149.229		
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	30	40		45		50		55		60			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	1	1		1		1		1		1			
2.24.03.1.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi					5.844.177		6.745.106		7.259.760		7.940.802		8.716.413	
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi (Daftar)	1	1		5.844.177	1	6.745.106	1	7.259.760	1	7.940.802	1	8.716.413	

2.24.03.1.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemsunahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi				5.844.173		6.745.103		7.259.754		7.940.797		8.716.408		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemsunahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemsunahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Arsip)	200	300	5.844.173	350	6.745.103	400	7.259.754	450	7.940.797	500	8.716.408		
2.24.03.1.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota				5.844.173		6.745.103		7.259.754		7.940.797		8.716.408		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota (Arsip)	30	40	5.844.173	45	6.745.103	50	7.259.754	55	7.940.797	60	8.716.408		
2.24.03.1.04 - Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi				37.878.014		43.717.236		47.052.860		51.466.928		56.493.918		
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	7	10	37.878.014	15	43.717.236	20	47.052.860	25	51.466.928	30	56.493.918		
	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	10	15		20		25		30		35			
2.24.03.1.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				18.939.007		21.858.618		23.526.430		25.733.464		28.246.959		
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	7	10	18.939.007	15	21.858.618	20	23.526.430	25	25.733.464	30	28.246.959		
2.24.03.1.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				18.939.007		21.858.618		23.526.430		25.733.464		28.246.959		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	10	15	18.939.007	20	21.858.618	25	23.526.430	30	25.733.464	35	28.246.959		
2.24.03.1.05 - Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang				12.822.576		14.799.285		15.928.470		17.422.734		19.124.487		
Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2	5	12.822.576	7	14.799.285	10	15.928.470	12	17.422.734	15	19.124.487		
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	5	7		10		12		15		17			
	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5	7		10		12		15		17			
2.24.03.1.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				4.274.192		4.933.095		5.309.490		5.807.578		6.374.829		
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan (Arsip)	2	5	4.274.192	7	4.933.095	10	5.309.490	12	5.807.578	15	6.374.829		
2.24.03.1.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang				4.274.192		4.933.095		5.309.490		5.807.578		6.374.829		
Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	5	7	4.274.192	10	4.933.095	12	5.309.490	15	5.807.578	17	6.374.829		
2.24.03.1.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				4.274.192		4.933.095		5.309.490		5.807.578		6.374.829		
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5	7	4.274.192	10	4.933.095	12	5.309.490	15	5.807.578	17	6.374.829		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				283.763.857		327.508.493		352.497.391		385.565.458		423.225.257		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup (%)	0	100	283.763.857	100	327.508.493	100	352.497.391	100	385.565.458	100	423.225.257	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka (%)	0	100		100		100		100		100			
2.24.04.1.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi				283.763.857		327.508.493		352.497.391		385.565.458		423.225.257		

Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Provinsi	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan (SOP)	0	1	283.763.857	1	327.508.493	1	352.497.391	1	385.565.458	1	423.225.257		
---	--	---	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGLIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	0	5		10		15		20		25			
2.24.04.1.01.0004 - Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				141.881.929		163.754.247		176.248.696		192.782.729		211.612.629		
Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan (SOP)	0	1	141.881.929	1	163.754.247	1	176.248.696	1	192.782.729	1	211.612.629		
2.24.04.1.01.0005 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				141.881.928		163.754.246		176.248.695		192.782.729		211.612.628		
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	0	5	141.881.928	10	163.754.246	15	176.248.695	20	192.782.729	25	211.612.628		

4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 5 Program wajib dan 1 Program Penunjang dengan jumlah 24 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan teknis dan 9 (sembilan) kegiatan rutin, dari beberapa program wajib Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

(1) Program Pembinaan Perpustakaan

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi.
- 2) Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi
- 3) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

(2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

- 1) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

(3) Program Pengelolaan Arsip

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- 2) Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi

program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2.23.02.1.01.0012 - Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi 2.23.02.1.01.0015 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
2.	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.1.04 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2.23.03.1.04.0001 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
3.	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah disusun agar selaras dengan arah pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta mendukung indikator nasional dari Perpustakaan Nasional RI dan ANRI.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama rancangan Akhir Renstra

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	71,7	72	73	75	77	80	83	
3.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	63,49	70	71	72	73	74	75	

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Tengah Tahun (2025–2029), urusan perpustakaan harus menunjukkan kinerja penyelenggaraan melalui IKI (Indikator Kinerja Kunci), yang mencerminkan capaian prioritas pembangunan daerah dan capaian Reformasi Birokrasi Tematik SDM & Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Kunci pada urusan Perpustakaan terdiri dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat (TGM). Target 2025–2029 untuk IPLM naik secara progresif, dan target TGM naik secara progresif, sehingga bisa menunjukkan perbaikan layanan literasi dan budaya baca masyarakat. Untuk pencapaian target IPLM dan TGM tersebut di atas maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan Penguatan layanan perpustakaan berbasis inklusi, Penambahan koleksi bahan bacaan, Literasi digital dan kegiatan gemar membaca berbasis komunitas dan pembinaan perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan.

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan (IHPK) adalah indikator utama keberhasilan urusan kearsipan dalam Renstra Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Target capaian IHPK 2025–2029 adalah naik menuju kategori “**Baik**” (75) di akhir periode.

Untuk mencapai nilai tersebut Dinas Perpustakaan dan kearsipan yang membidangi kearsipan harus memperkuat Sumber Daya Manusia & sarana dan prasarana kearsipan.

Berikut Tabel Indikator Kinerja Kunci pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan Target 2025–2029 untuk IPLM dan target TGM naik secara progresif serta Target capaian IHPK 2025–2029 adalah naik menuju kategori **“Baik”**.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Resntra Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.23- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	komulatif	Indeks	71,7	72	73	75	77	80	83	
3.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	komulatif	Nilai	67	68	70	72	74	76	78	
4.	2.24- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
5.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	komulatif	Indeks	63,49	65	67	69	71	73	75	

BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 ini merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah .

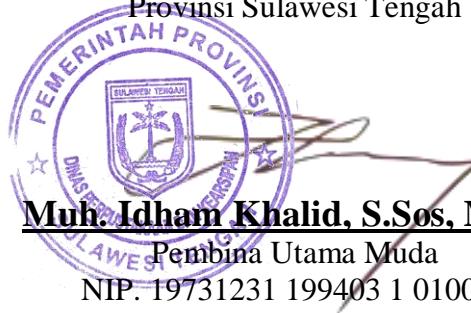
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 15, mengamanatkan pada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana srategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah disusun secara konsisten dan selaras dengan RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terbentuk satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan dalam memberikan kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah harus digunakan sebagai pedoman dan arah pelayanan bidang perpustakaan dan arsip bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil

pembangunan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Palu, 01 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah



Muh. Idham Khalid, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19731231 199403 1 010003

